

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan pengujian statistik. Dalam penelitian ini peneliti membatasi jangka waktu 3 tahun yaitu 2020-2022

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan melalui situs <http://www.djpk.dep.keu.go.id>. Penelitian ini direncanakan pada bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh APBD pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan data tahun 2020-2022. Obyek yang diteliti adalah realisasi PAD, DBH dan Belanja Daerah yang ada pada laporan realisasi pada portal APBD dan TKDD untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 kabupaten/kota merupakan sampel dalam penelitian ini.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa Laporan realisasi APBD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah yang bersumber dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dari Laporan Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah Realisasi Anggaran Belanja Daerah (APBD), PAD dan DBH.

##### 2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan realisasi APBD seluruh Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2020-2022. Objek penelitian meliputi PAD, DBH dan Belanja Daerah di 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2020-2022.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Kajian Dokumen

Metode ini dilaksanakan dengan mengkaji format-format, laporan-laporan, dan arsip.

## 2. Akses Internet

Metode ini dilaksanakan dengan melihat situs yang berhubungan dengan dana Laporan realisasi APBD dan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

## F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan menggunakan analisis regresi linier berganda yang dapat mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dengan dibantu program komputer yaitu SPSS 23 dan *Microsoft Excel* 2013 serta untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat maka dilakukan uji hipotesis.

### 1. Analisis Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variable-variabel penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah.

### 2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui, menguji serta memastikan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana variabel tersebut berdistribusi normal bebas multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik digunakan

yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (*Wijaya, 2012:132*). Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ditunjukkan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas (*Wijaya, 2012:125*). Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilihat dari nilai toleransi dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai toleransi  $<0,1$  atau sama dengan  $VIF > 10$  (Sekaran, 2009:323).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan (*Wijaya, 2012:130*). Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas atau tidak terjadi

Heteroskedastisitas karena data *cross section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh PAD dan DBH terhadap Belanja Daerah. Model persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi

Y = Belanja daerah

X1 = Pendapatan asli daerah (PAD)

X2 = Dana bagi hasil (DBH)

$\varepsilon$  = Error

#### b. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)

Koefisien ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independent dalam menjelaskan variasi variable dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable independent memberikan hamper

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen (Ghozali, 2016:95).

c. Uji F (Koefisien Regresi Secara Simultan)

Menurut Ghozali (2016:96) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah variable bebas (independent) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable terikat (dependen). Prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 1) Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 dengan derajat (n-k), dimana n: jumlah pengamatan dan k: jumlah variabel. 2) Kriteria keputusan: a) Uji Kecocokan model ditolak jika  $\alpha > 0,05$  b) Uji Kecocokan model diterima jika  $\alpha < 0,05$

d. Uji Statistik t

Analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independent. Uji yang dilakukan adalah uji t. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan tingkat signifikan dimana yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Jika tingkat signifikan  $>0,05$  maka hipotesis ditolak. Jika tingkat signifikan  $<0,05$  maka hipotesis diterima (Ghozali, 2016)

### **G. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran**

Variabel independent (X) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2) Dan Variabel dependent (Z) adalah Belanja Daerah (Y).

a. Variabel Independent

1. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1) Pajak Daerah, yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan air.

2) Retribusi Daerah, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perizinan tertentu

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan

Milik Daerah yang dipisahkan, yaitu

- a. Hasil penjualan asset daerah dan jasa giro
- b. Penerimaan dari pihak ketiga bukan perusahaan daerah
- c. Deviden
- d. Ganti biaya dokumen lelang

4) Lain-lain PAD yang sah, yaitu:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Pendapatan bunga
- c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- d. Penerimaan komisi
- e. Potongan maupun bentuk lain sebagaimana akibat dari
- f. penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari portal APBD dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah.}$
--

2. Dana Bagi Hasil (X2)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, pembagian Dana Bagi Hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah dengan potensi sumber daya alam yang banyak akan memperoleh porsi Dana Bagi Hasil yang cukup besar berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang telah digali. Selain itu, Dana Bagi Hasil juga bersumber dari bagi hasil pajak.

Proporsi Dana Bagi Hasil menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29
4. Kehutanan
5. Pertambangan Umum
6. Perikanan
7. Pertambangan Minyak Bumi
8. Pertambangan Gas Bumi
9. Pertambangan Panas Bumi

Dana Bagi Hasil (DBH) dapat diukur dengan rumus:

$$\text{DBH} = \text{Bagi Hasil Pajak} + \text{Bukan Pajak}$$

b. Variabel Dependen (Belanja Daerah Y)

Belanja Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis yaitu:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri atas empat belanja yaitu:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja hibah
- d. Belanja bantuan social

b. Belanja Modal

c. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer

Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Belanja bagi hasil
- b. Belanja Bantuan Keuangan